

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang ini, KPU Kota Bandung sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

Laporan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung Tahun 2015 ini kami susun dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Standar Layanan Informasi dan pasal 46 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Meskipun PPID KPU Kota Bandung belum mampu memberikan layanan secara maksimal dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, KPU Kota Bandung berusaha memberikan layanan informasi publik secara profesional, akurat, santun terbuka dan inovatif sesuai dengan motto kami PASTI.

Bandung, Maret 2016

PPID Kota Bandung siap memberikan pelayanan informasi dengan

Profesional **A**kurat **S**antun **T**erbuka dan **I**novatif

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung

Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Rincian Pelayanan Informasi Publik dan Grafik

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Rekomendasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

SK PPID

Struktur PPID KPU Kota Bandung

Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik

Rincian Pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2015

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010 dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan UU KIP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, bertujuan meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

Pada 30 Maret 2015 KPU Republik Indonesia (KPU RI) telah berhasil menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Terbitnya PKPU ini disusul dengan terbitnya Surat Edaran KPU RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015. Serta diterbitkannya Keputusan KPU nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai tindak lanjut KPU Kota Bandung menyiapkan dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bandung dengan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015. Sehingga pelayanan informasi yang selama ini dilakukan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandung beralih ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Bandung.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan Informasi kepada Publik semua Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Bandung mulai menginventarisir seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan masing-masing, dan disampaikan kepada PPID untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kota Bandung.

Selain itu terkait Surat Edaran KPU No. 113/KPU/III/2015 tertanggal 1 Maret 2015, KPU Kota Bandung telah mengaktifkan e-PPID KPU Kota Bandung di laman website e-PPID KPU RI. Namun dikarenakan website KPU Kota Bandung sedang dalam masa proses pengembangan dan perbaikan, maka tautan ini belum bisa diintegrasikan dengan Website KPU Kota Bandung.

PPID - KPU KOTA BANDUNG

Tertuka - Berbasis



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

[Beranda](#)
[Profil](#)
[Informasi Publik](#)
[Layanan Informasi](#)
[Regulasi](#)
[Gallery](#)
[FAQ](#)

[Login](#)



Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Sampurasun.....

e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung siap memberi pelayanan informasi publik



“
Terimakasih KPU telah memberikan data hasil pileg DPR RI dan Pilpres 2014, dengan respon yang sangat cepat
”

Jahan FR
Deputy Of Economic & Related Studies

Login Pemohon Informasi

Email

Kata Kunci

[LOGIN](#)

[REGISTRASI](#)

Komisi Pemilihan Umum

[JDIH KPU](#)

[Sistem Informasi Penyelenggara](#)

Hubungi Kami:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Bandung

Alamat:
Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi

Hubungi Kami:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Bandung

Alamat:
Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Humas) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Jl. Soekarno Hatta No. 260
Bandung 40266
T. (022) 7506654 Ext. 13
F. (022) 7506654

humas.kpubandungkota@gmail.com
[Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung](#)
[@kpu.kotabandung](#)

Tak disangka semudah ini. Seharusnya, dari awal kami ke PPID KPU

Spk, Hultman, dan rekan Advokat

e-PPID merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi. Silahkan melakukan Registrasi di kolom sebelah kanan Anda.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip hak atas informasi publik dan prosedur permohonan informasi, silakan membuka menu Layanan Informasi, FAQ, Regulasi atau tayangan Video di sebelah kiri Anda.

e-PPID juga menyajikan informasi berdasarkan kategori: Vajb Diumumkan Berkala, Vajb Diumumkan Serta Merta, dan Vajb Tersedia Setiap Saat. Silakan buka menu Informasi Publik.

Pada menu Profil, kami menyajikan struktur PPID pada KPU Kota Bandung. Apa saja kegiatan KPU dalam rangka menjalankan keterbukaan informasi? Silakan buka menu Gallery.

Ayo, Gunakan Hak Atas Informasi Publik, Untuk Indonesia yang Lebih Baik!

[LAMPUNG](#)
[KEP. BANGKA BELITUNG](#)
[KEPULAUAN RIAU](#)
[DKI JAKARTA](#)

Hak Cipta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223 ; Fax. 021-31577359

PPID - KPU KOTA BANDUNG

Tertuka - Berbasis



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

[Beranda](#)
[Profil](#)
[Informasi Publik](#)
[Layanan Informasi](#)
[Regulasi](#)
[Gallery](#)
[FAQ](#)

[Login](#)

Pembina

Pertimbangan

Atasan PPID

PPID

Desk Pelayanan

Tim Penghubung

Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari:

1. Rofiq Alimbarok, S. Ag., M. Si. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung)
2. Akhmad Robiqin, M. Ag. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung)
3. Apipudin, S. Si. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung)
4. Suharti, ST (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung)
5. Budi Tresnayadi, SH., MH. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung)

Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU

LAMPUNG

KEP. BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

DKI JAKARTA

SARANA DAN PRASARANA

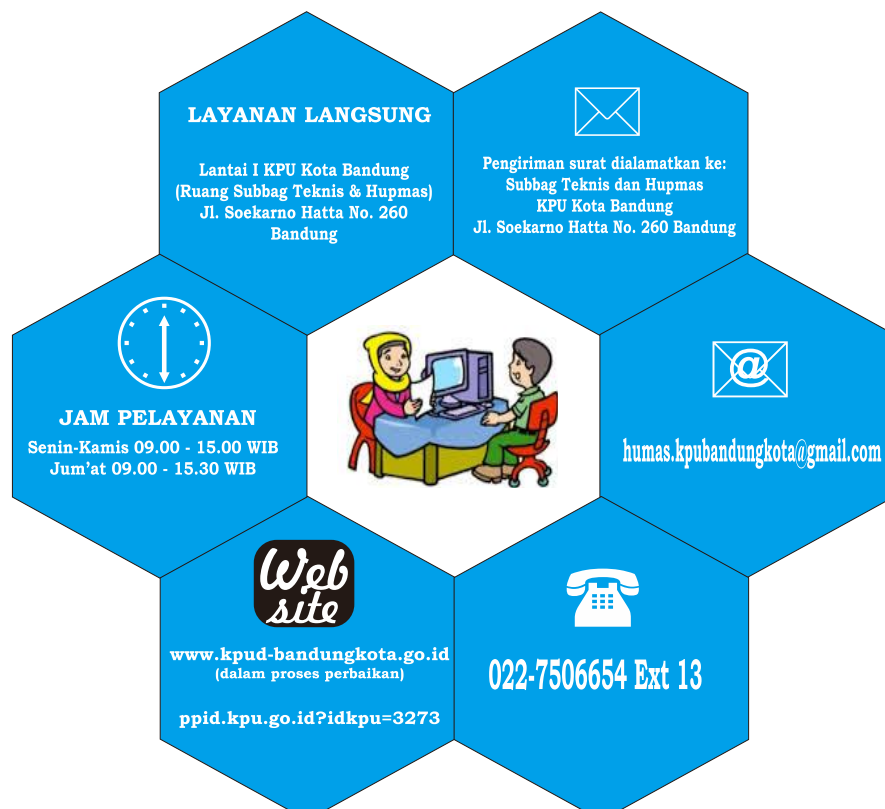
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

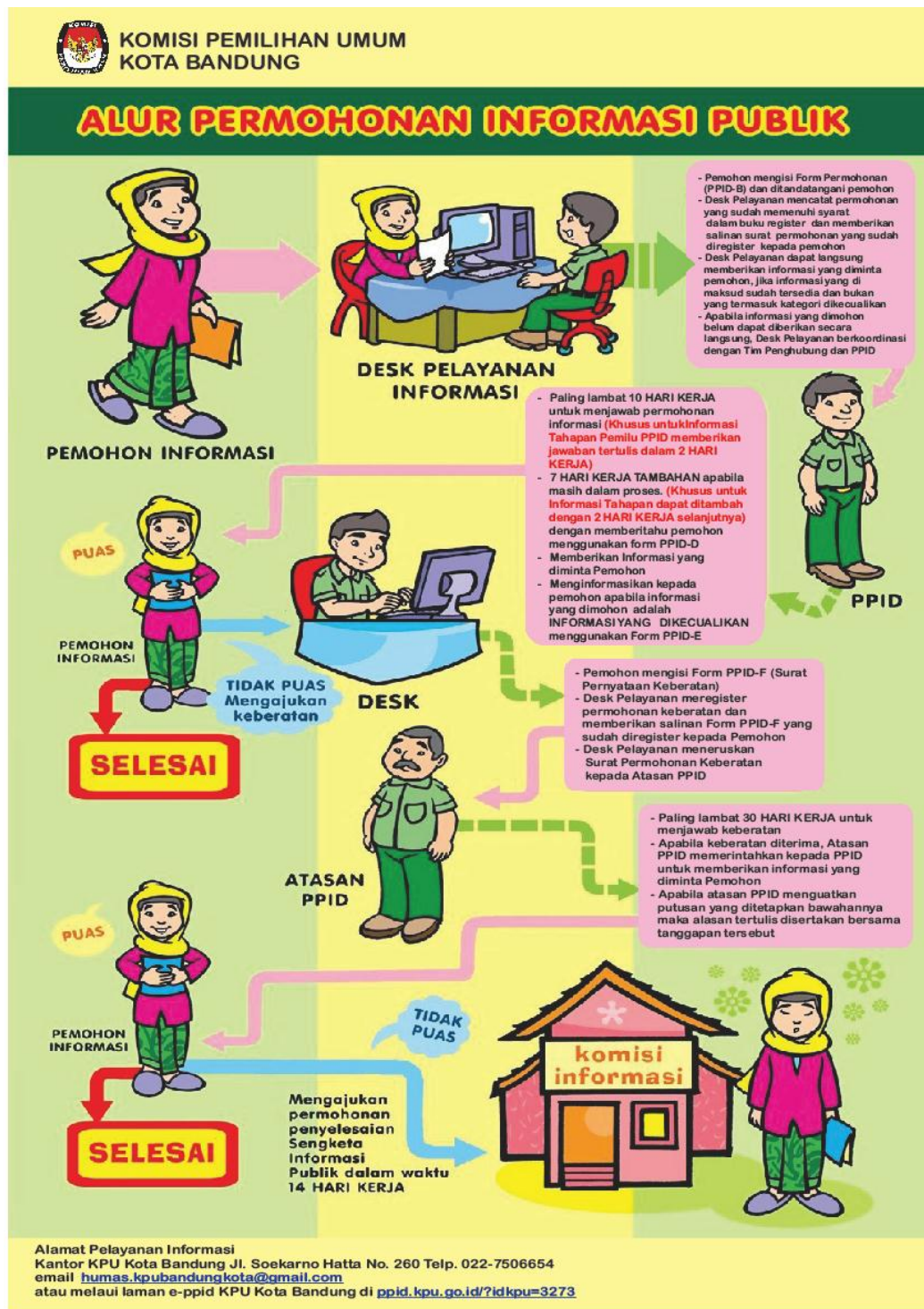
Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Bandung memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik melalui telepon, surat elektronik, faksimili, maupun pelayanan secara langsung kepada pemohon informasi.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Kantor KPU Kota Bandung melalui desk pelayanan Informasi dan dokumentasi di ruangan Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandung.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan dimulai pukul 09.00 wib s.d. 15.00 wib. Kecuali hari Jumat sampai dengan pukul 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor KPU Kota Bandung.



Pemohon informasi yang mengajukan permohonan langsung dilayani oleh desk pelayanan. Untuk keperluan ini PPID Kota Bandung sudah mempersiapkan formulir permohonan yang dibutuhkan oleh pemohon. Adapun alur permohonan informasi di KPU Kota Bandung bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



Dalam struktur PPID yang telah dibentuk dan di sahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, terdiri dari :

1. Pembina PPID, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu : Anggota KPU Kota Bandung yang membidangi Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris KPU Kota Bandung, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kota Bandung;
3. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Bandung;
4. PPID adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staff yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian Sekretariat KPU Kota Bandung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staff pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2015 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Informasi diberikan seluruhnya	19 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari
2.	Informasi diberikan sebagian*	1 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari
3.	Permohonan informasi direspon tapi tidak ditindaklanjuti	2 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari
4.	Permohonan informasi ditolak	-	-
JUMLAH		22 PEMOHON INFORMASI	

* Permohonan informasi dikabulkan sebagian dikarenakan sebagian informasi belum didokumentasikan.

Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, partai politik, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk penelitian dan bahan evaluasi partai politik dalam perolehan suara baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional.

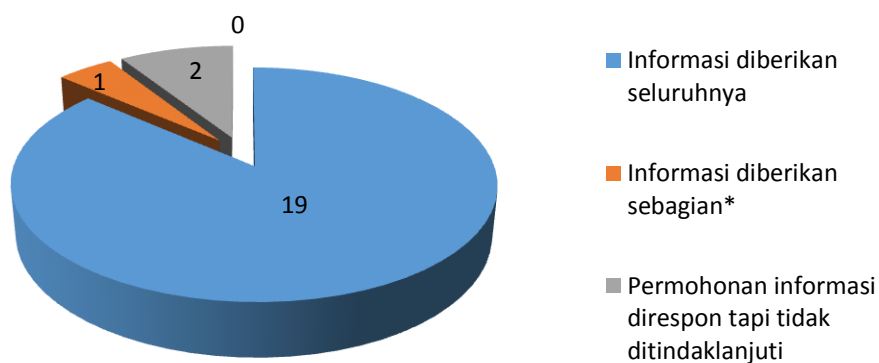
**Data Lengkap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 terlampir*

NO	LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI	JUMLAH	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
1.	Mahasiswa	8 pemohon informasi	Penelitian
2.	Lembaga	1 pemohon informasi	Penelitian dan Pengawasan
3.	Partai Politik	6 pemohon informasi	Bahan Evaluasi
4.	SKPD	2 pemohon informasi	Data Base
5.	Perseorangan/calon anggota legislatif	5 pemohon informasi	Bahan Evaluasi

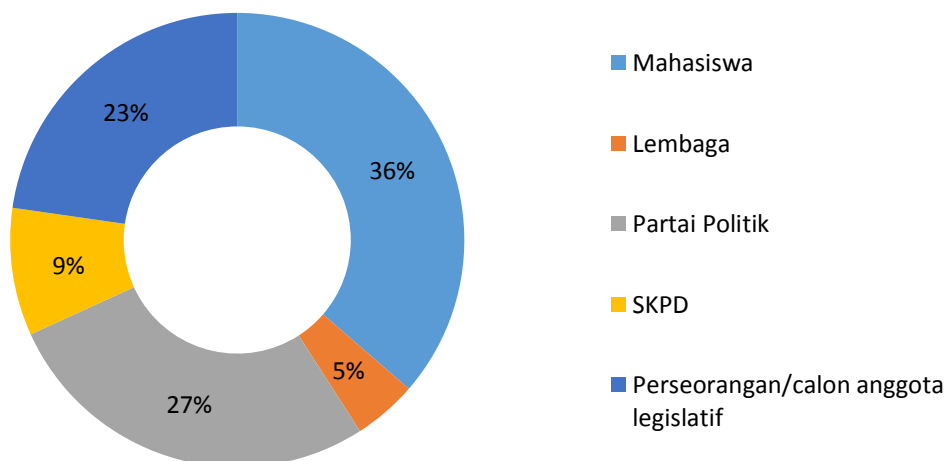
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

GRAFIK I
RINCIAN INFORMASI BERDASARKAN TINDAK LANJUT



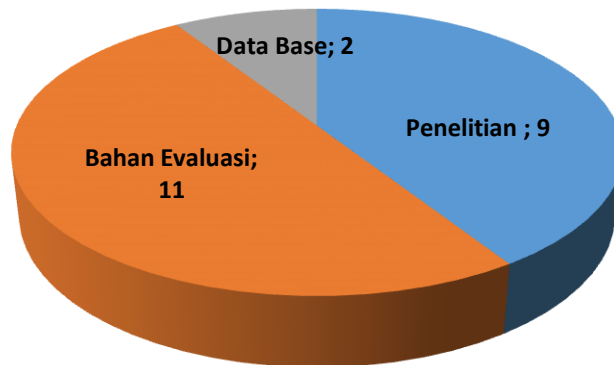
GRAFIK II
RINCIAN PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN LATAR BELAKANG



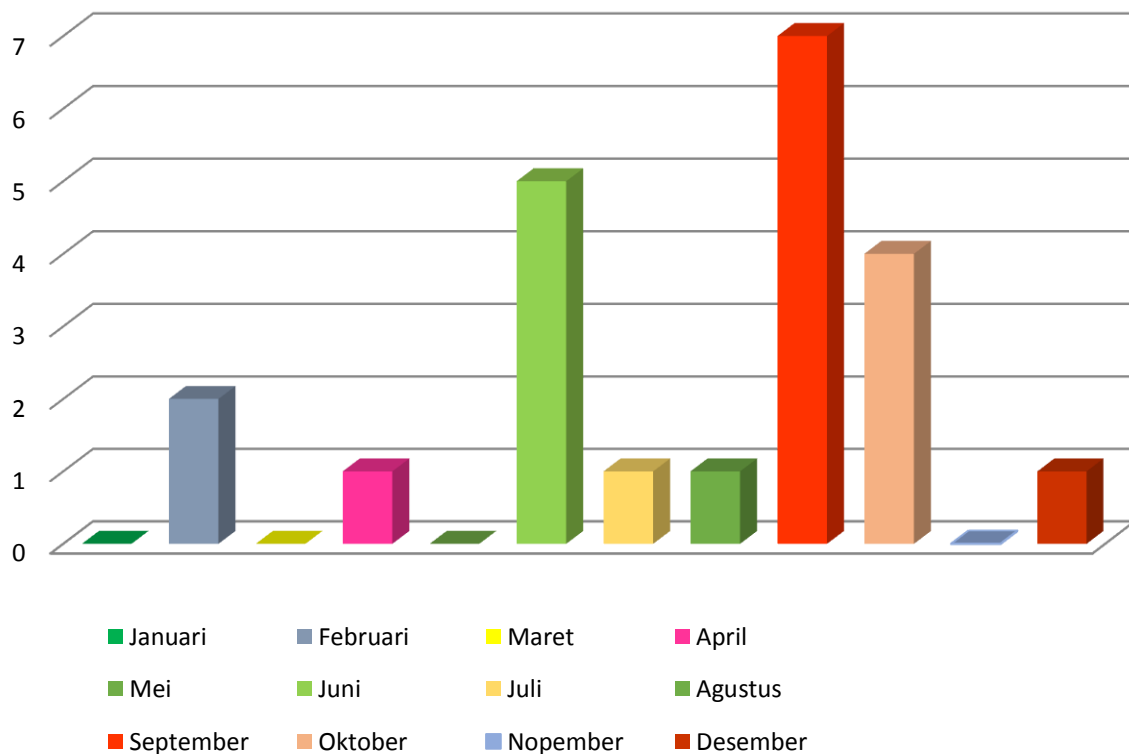
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

GRAFIK III
RINCIAN PEMOHON INFORMASI PERMOHONAN BERDASARKAN
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI



GRAFIK IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PEMOHON
PERBULAN SELAMA TAHUN 2015



- Bulan Januari, Maret, Mei dan Nopember tidak ada permohonan informasi

**PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG**



Selama tahun 2015, PPID di lingkungan KPU Kota Bandung tidak menerima satupun pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.

KENDALA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kota Bandung adalah sebagaiberikut :

1. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di dalam internal KPU Kota Bandung;
2. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasi secara optimal di internal lingkungan KPU Kota Bandung sehingga semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU belum merata;
3. Struktur PPID KPU Kota Bandung sudah terbentuk, tetapi masing-masing fungsi belum berjalan secara optimal;
4. Pengelolaan arsip belum tersusun baik, bahan informasi publik masih dalam tahap pemutakhiran;
5. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hardcopy* sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi;
6. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi masih terbatas;
7. Belum optimalnya pengelolaan Website KPU Kota Bandung, sehingga perlu banyak perbaikan untuk mempermudah akses kepada masyarakat;
8. Belum adanya SDM yang mampu mengelola website secara dinamis dan berkelanjutan, sehingga ;
9. Tidak tersedianya anggaran dari KPU RI untuk optimalisasi PPID dan pengelolaan website KPU Kab/Kota;

Rekomendasi dan RTL (Rencana Tindak Lanjut)

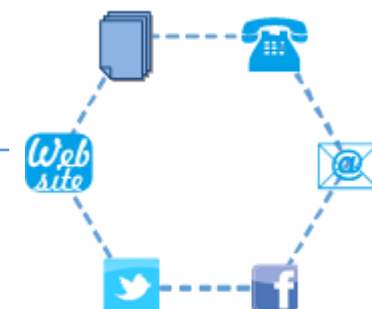
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

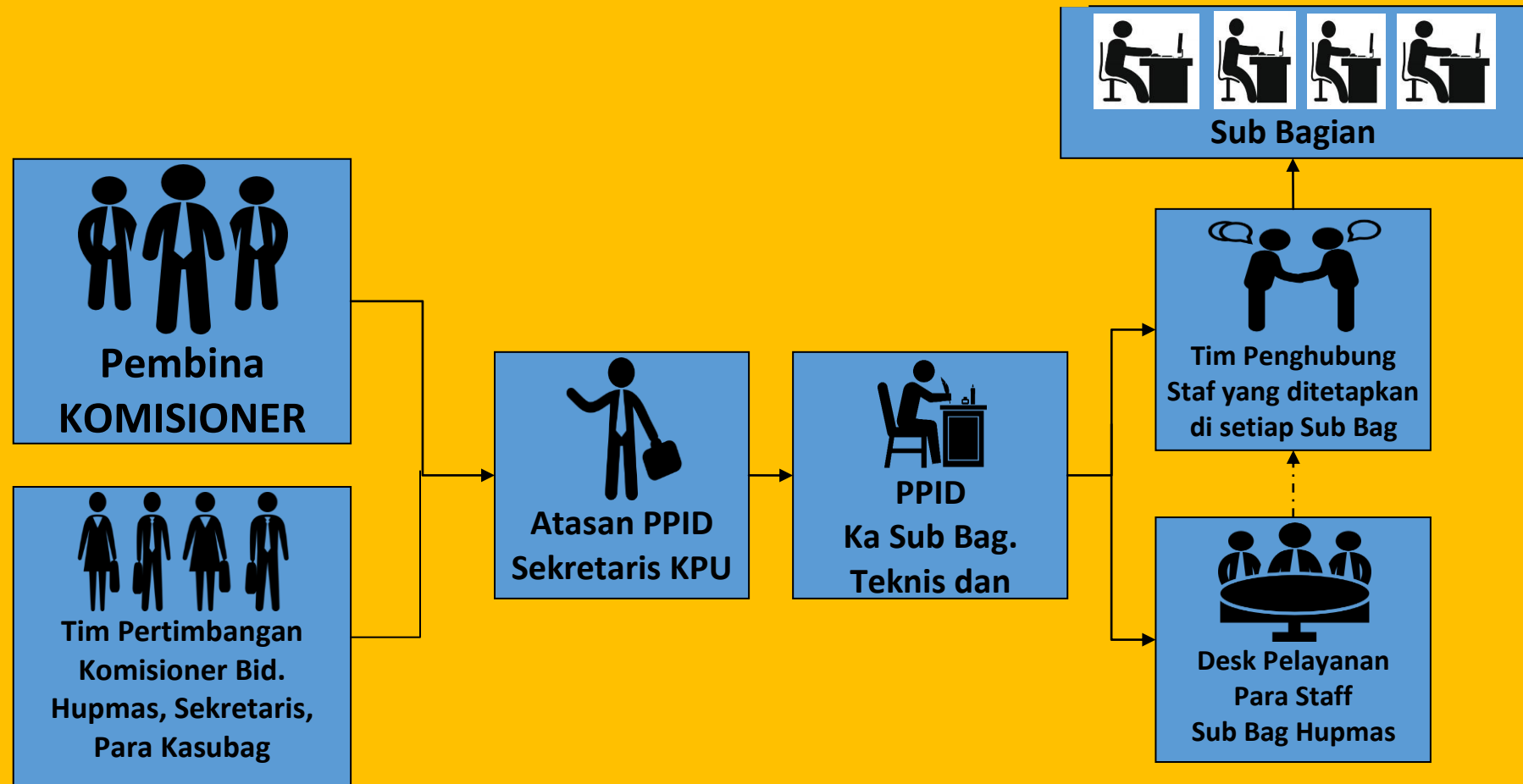
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi :

1. Adanya anggaran dari KPU RI untuk PPID dan pengelolaan Website;
 2. Adanya keputusan KPU RI terkait klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut :

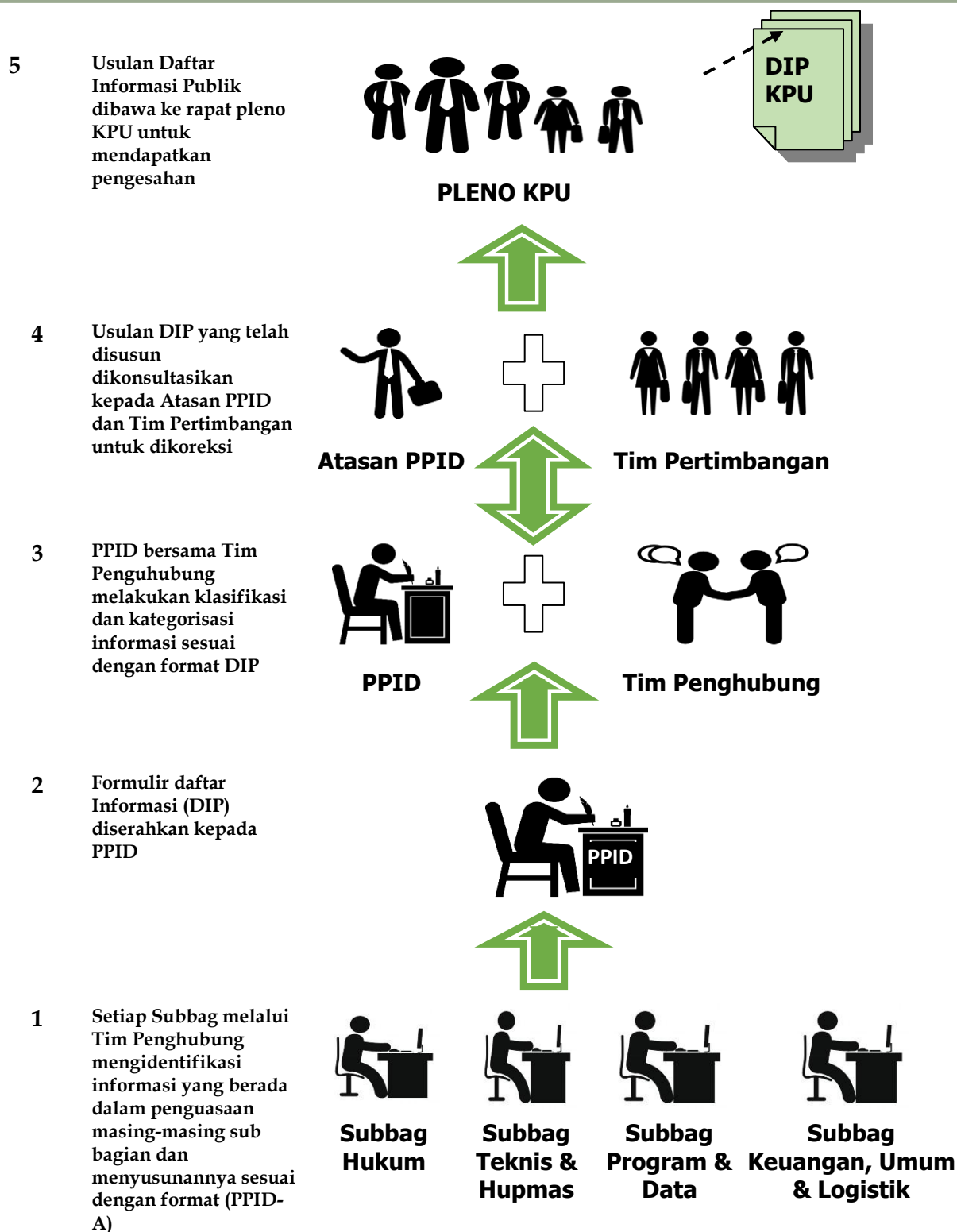
1. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk memberikan pemahaman tentang UU KIP dan PKPU No.1 Tahun 2015 di internal KPU Kota Bandung dan kepada pihak eksternal.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.
3. Lebih meningkatkan profesionalitas PPID yang telah terbentuk di lingkungan KPU Kota Bandung.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Pengembangan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi .
6. Pengembangan sistem layanan informasi publik melalui e-ppid, sehingga diharapkan permohonan informasi dapat dilakukan secara online.
7. Pemutakhiran daftar informasi publik secara lebih sistematis, berkala dan berkelanjutan.



STRUKTUR PPID



TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK



LAMPIRAN IV

PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KPU KOTA BANDUNG KEPADA PUBLIK TAHUN 2015					
No	NOMOR REGISTER	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAKLANJUT
1	01/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/II/2015	17-02-2015	Alan Barok (JPPR Jawa Barat)	Data TPS Kota Bandung pada Pemilu 2014	Dipenuhi
2	02/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/II/2015	20-02-2015	Nadzara Syahida Yusuf	Data rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg Tahun 2009 dan Pileg Tahun 2014	Dipenuhi
3	03/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IV/2015	10-04-2015	Yasser Dharma Alhusainni (UNISBA)	Data daftar Pemilih Tetap, data calon tetap, data anggota DPRD Terpilih dalam Pemilu tahun 2014	Dipenuhi
4	04/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VI/2015	09-06-2015	Deby Fitriana (UNPAD)	Data pemilih pemula Tahun 2004 dan tahun 2009 di Kelurahan Derwati	sudah dipenuhi namun tidak jadi diambil
5	05/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VI/2015	18-06-2015	I Fachril Maden, SH	Data rekapitulasi hasil perolehan suara PPP Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Model DB1-DPR dan DPRD Provinsi)	Dipenuhi
6	06/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VI/2015	23-06-2015	Dang Heri Mukti (Partai Gerinda)	Data rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Gerindra Pileg Tahun 2014 (Model DB1 DPRD Kota Bandung)	Dipenuhi
7	07/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VI/2015	24-06-2015	Yulius. U (PDIP)	Data rekapitulasi hasil perolehan suara PDIP Pileg Tahun 2014 (Model DB1 DPRD Kota Bandung)	Dipenuhi
8	08/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VI/2015	30-06-2015	Partai HANURA	Data rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Hanura Pileg Tahun 2014 (Model DB1 DPRD Kota Bandung)	Sudah di konfirmasi, namun belum diambil

No	NOMOR FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAKLANJUT
9	09/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VII/2015	13-07-2015	Akhmad Ridho (UNPAD)	Data tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pileg dan Pilpres Tahun 2014	Dipenuhi
10	10/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/VIII/2015	25-08-2015	I Fachril Maden, SH	Data rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg Tahun 2014 (Model DB1-DPR dan DPR RI) dan DPT Pileg Tahun 2014	Dipenuhi
11	11/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	09-09-2015	Hukmul Ulum, SH	Data rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg Tahun 2014 (Model EB 1 Dapil Bandung 6) Partai Hanura	Dipenuhi
12	12/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	15-09-2015	Ahid Nur Istinah (BPS Kota Bandung)	Data suara sah dan tidak sah, jumlah DPT, yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, DCT, jumlah perolehan suara sah partai politik, dalam Pilgub 2013, Pilwalkot 2013, Pileg dan Pilpres 2014.	Dipenuhi
13	13/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	15-09-2015	Rangga Rifqi Pratama (Telkom University)	Data hasil scan C1 Pilpres Tahun 2014 tiap TPS Kota Bandung	Dipenuhi
14	14/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	17-09-2015	Robby Abdul Malik (Universitas Katolik Parahyangan)	Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot Bandung Tahun 2013	Dipenuhi
15	15/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	21-09-2015	Sofian Arissa Putra dan Firdhan Ghifari (Telkom University)	Informasi tentang alur pemilu, dan sistem informasi yang digunakan KPU dalam Pemilu	Dipenuhi
16	16/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	28-09-2015	Muhammad Dalih Nawawi (STMIK Mardira Indonesia Bandung)	Data hasil scan Biodata Paslon, Foto paslon, Visi Misi Paslon dalam Pilwalkot Tahun 2013	Dipenuhi

No	NOMOR FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAKLANJUT
17	17/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/IX/2015	29-09-2015	H.Rizal Khairul, S.Ip., M.Si (Partai Golkar)	Data jumlah raihan suara DPRD Kota Bandung tingkat TPS Partai GOLKAR pada Pemilu Legislatif Tahun 2013 di Dapil 6 (Model Form. D1 dapil 6)	Dipenuhi
18	18/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/X/2015	06-10-2015	Rosita Dewi (Kyoto University, Jepang)	Data hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dalam Pilwalkot Tahun 2013 per Kecamatan se-Kota Bandung	Dipenuhi
19	19/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/X/2015	08-10-2015	Arief Mujahidillah (Diskominfo Kota Bandung)	Data Pemenangan Pemilu dan Pilkada Tahun 2004, 2008, 2009, 2013, dan 2014	Baru dipenuhi sebagian
20	20/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/X/2015	13-10-2015	Rendiana Awangga (Partai Nasdem)	Data Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014 (Form.D1) Dapil IV (7 Kecamatan)	Dipenuhi
21	21/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/X/2015	20-10-2015	F.X.Grindo Widoyo	Data perolehan suara partai politik dan caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 & Tahun 2014 dan perolehan suara presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden Tahun 2009 & Tahun 2014	Dipenuhi
22	22/PPID/KPU.kotabdg/Form.B/XII/2015	01-12-2015	Nanang Juhana (DPC PPP Kota Bandung)	Data Calon Tetap Kota Bandung (DCT Pileg 2014), Data Perolehan suara Caleg Kota Bandung (Model EB), dan Profil Anggota DPRD Kota Bandung terpilih.	Dipenuhi

